



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2023

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI
DAERAH KOTA BOGOR**

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kehadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2023. Penyusunan LKIP ini merupakan perwujudan salah satu indikator (tolok ukur) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berkaitan dengan Kinerja Instansi Pemerintah dalam memberikan pelayanan prima serta menyampaikan pertanggung-jawaban kinerja kepada pemerintah (Provinsi dan Pusat) serta masyarakat pada umumnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2023 yang mengacu kepada Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2019 – 2024. Secara yuridis formal Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor Laporan Kinerja Nomor 4614), berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, kami telah berupaya secara optimal, namun kami menyadari bahwa dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna dan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan serta penyempurnaan penyusunan laporan di tahun yang akan datang.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam mengevaluasi pelaksanaan target kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor.

Bogor, 31 Januari 2024

Kepala,

Rudy Mashudi S.T., M.P.
NIP. 197707062006041018

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi instansi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

LKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor tahun 2023 merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dimana pelaporan capaian kinerja Perangkat Daerah secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKIP ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana pengukuran sasaran strategis yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor pada tahun 2023 telah berhasil dicapai.

Terdapat 6 (enam) Indikator Kinerja Utama pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor yang pencapaian pada tahun 2023 dijabarkan sebagai berikut :

1. Sasaran strategis Meningkatkan Kreativitas, Inovasi, dan peran litbang dalam pengambilan Kebijakan Pembangunan Daerah, dengan indikator kinerja (1) Kategori Inovasi Daerah dengan realisasi Kategori Inovatif (100%); (2) Persentase Rekomendasi Hasil Litbang yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan dengan realisasi 100% (117,75%); (3) Indeks Kualitas Kebijakan dengan realisasi kategori Baik (100%).
2. Sasaran strategis Meningkatkan capaian kinerja, sinergitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah dengan indikator kinerja (1) Nilai hasil evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota dengan realisasi 24,05 (96,2%); (2) Indikator kinerja sasaran pembangunan daerah yang mencapai target dengan realisasi 70,97% (88,57%).

3. Sasaran strategis Meningkatnya tata kelola Bappeda yang efektif, efisien dan akuntabel dengan indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi tingkat Perangkat Daerah realisasinya adalah 89,8 (110,9%).

Dari hasil evaluasi pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor ke depan yaitu untuk lebih fokus dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam mendukung ketercapaian Visi dan Misi Kota Bogor, berkaitan dengan hasil evaluasi tersebut maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyempurnaan dokumen perencanaan melalui proses Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2025-2026 dengan memperhatikan rekomendasi LHE SAKIP 2023.
2. Melaksanakan penyempurnaan dokumen perencanaan tingkat Perangkat Daerah melalui proses Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2026.
3. Melaksanakan penyelarasan dalam penyusunan logical frame work dan penjenjangan kinerja Tingkat Kota dan penjenjangan kinerja tingkat Perangkat Daerah.
4. Melaksanakan pendampingan dan Asistensi serta penyelarasan dokumen RPD 2025-2026 dengan Renstra PD 2025-2026 dengan memperhatikan rekomendasi LHE SAKIP 2023.
5. Melakukan evaluasi dan penyesuaian target kinerja pada RKPD Perubahan tahun 2024 serta pada Renja Perangkat Daerah Perubahan tahun 2024, terutama pada target kinerja yang sudah tercapai pada tahun sebelumnya.
6. Secara internal melakukan optimalisasi pelaksanaan administrasi, perlu adanya peningkatan kualitas koordinasi antar Bidang sehingga proses perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja serta pelaporan lingkup Bappeda dapat terlaksana dengan optimal.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
IKHTISAR EKSEKUTIF	II
DAFTAR ISI	IV
DAFTAR TABEL	V
DAFTAR GAMBAR	VI
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. GAMBARAN UMUM BAPPEDA KOTA BOGOR	2
A) SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2
B) DATA PEGAWAI	3
C) ISU STRATEGIS	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	5
A. PERENCANAAN STATEGIS	5
B. PERJANJIAN KINERJA	6
C. RENCANA ANGGARAN	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	8
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	8
B. REALISASI ANGGARAN	39
C. ANALISIS EFISIENSI	40
BAB IV PENUTUP	44

DAFTAR TABEL

Table 1 Pegawai Bappeda Tahun 2023	3
Table 2 Penjabaran Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor	5
Table 3 Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor.....	6
Table 4 Rencana Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2023.....	7
Table 5 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	9
Table 6 Data Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2023.....	10
Table 7 Data Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kreativitas, Inovasi dan Peran Litbang Dalam Pengambilan Kebijakan Pembangunan Daerah	10
Table 8 Capaian Program yang mendukung Sasaran Meningkatnya Kreativitas, Inovasi dan Peran Litbang Dalam Pengambilan Kebijakan Pembangunan Daerah	11
Table 9 Kategori Pelajar SMP/MTS Sederajat.....	13
Table 10 Kategori Pelajar SMA/SMK/MA Sederajat	13
Table 11 Kategori Perguruan Tinggi/Lembaga/Pelaku Usaha	13
Table 12 Kategori Masyarakat	14
Table 13 Kategori Aparatur Sipil Negara (ASN).....	14
Table 14 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya capaian kinerja, sinergitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah	19
Table 15 Capaian Program yang Mendukung Sasaran Meningkatnya capaian kinerja, sinergitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah	20
Table 16 Rincian Evaluasi SAKIP Kota Bogor Tahun 2023.....	21
Table 17 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Tahun 2019-2024.....	23
Table 18 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya tata Kelola Bappeda yang efektif, efisien dan akuntabel.....	35
Table 19 Capaian Program yang mendukung Sasaran Meningkatnya Capaian Kinerja, Sinergitas dan Keberlanjutan Perencanaan Pembangunan Daerah ...	35
Table 20 Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Bappeda kota Bogor Tahun 2023.....	36
Table 21 Rincian Anggaran Per Sasaran Tahun 2023	40
Table 22 Anggaran dan Realisasi Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar I Struktur Organisasi dan Tata Kerja 2

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 mengamanatkan agar instansi pemerintah melakukan pelaporan terhadap pelaksanaan anggaran dan kinerja. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun rencana yang didukung oleh pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kewajiban ini merupakan salah satu bukti tertulis akan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Pada perkembangannya, amanat ini dikuatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang memperluas tujuan pelaporan sebagai salah satu upaya mewujudkan pemerintahan yang bebas serta bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di dalamnya, akuntabilitas kinerja menjadi bagian dari delapan area perubahan yang menjadi fokus dari reformasi birokrasi. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ditetapkan dan mempertegas urgensi pertanggungjawaban pencapaian kinerja terutama sebagai penggambaran upaya dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 merupakan upaya dalam memenuhi amanat peraturan perundang-undangan sebagaimana di atas. Namun tidak hanya itu, pelaporan ini juga merupakan media penyampaian informasi pencapaian kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor kepada para stakeholder. Sehingga, sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 dapat dinyatakan berhasil atau tidak berhasil dicapai. Pernyataan tersebut bermanfaat bagi stakeholder untuk melihat posisi pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor.

B. Maksud dan Tujuan

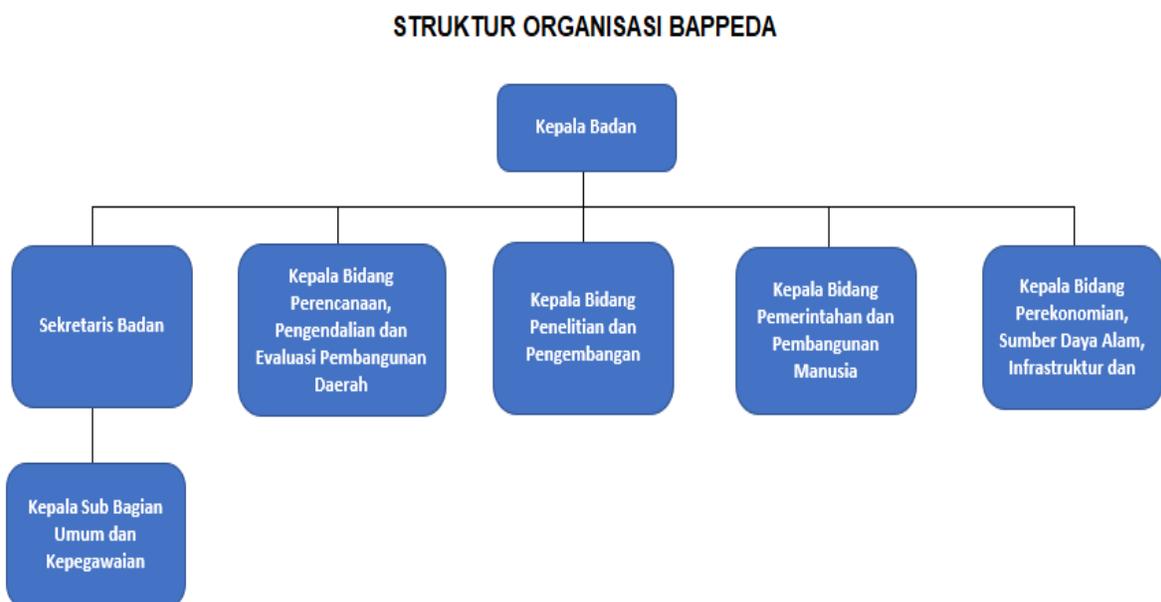
Penyusunan LKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor dimaksudkan sebagai penyampaian pertanggungjawaban pencapaian kinerja melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2023. Adapun tujuan dari penyusunan LKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2023 adalah sebagai penyajian ketercapaian sasaran dan target kinerja utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2023, penggambaran upaya yang dilakukan untuk pencapaian kinerja, efisiensi pemanfaatan anggaran, serta sebagai evaluasi bagi perbaikan perencanaan kinerja di masa datang.

C. Gambaran Umum Bappeda Kota Bogor

a) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Dasar Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor adalah Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor. Di dalamnya disebutkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor adalah unsur penunjang di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah serta penelitian dan pengembangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan bertanggungjawab kepada Wali Kota Bogor.

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor sebagaimana Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 59 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor, dapat disajikan dalam gambar berikut ini :



Gambar 1.1
Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Sumber: Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

b) Data Pegawai

Berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia per 31 Desember 2023, pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor Berjumlah 60 orang yang terdiri dari 43 orang PNS, 2 orang P3K, dan 15 orang tenaga administrasi Non ASN, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 1.1
Pegawai Bappeda Tahun 2023

No	Nama Jabatan	Jumlah Kondisi SDM Saat Ini (s.d tahun 2023)		
		PNS	P3K	Non PNS
A	Jabatan Struktural			
1	Kepala	1	0	0
2	Sekretaris	1	0	0
3	Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1	0	0
4	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	1	0	0
5	Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pebangunan Daerah	1	0	0
6	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	1	0	0
7	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	0	0
B	Jabatan Fungsional			
1	Perencana Ahli Madya	3	0	0
3	Analisis Kebijakan Muda	2	0	0
4	Perencana Ahli Muda	17	0	0
5	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Muda	1	0	0
6	Pranata Komputer Muda	1	0	0
7	Perencana Ahli Pertama	2	0	0
8	Pranata Komputer Pertama	0	2	0
C	Jabatan Pelaksana			
1	Analisis SDM Aparatur	1	0	0
2	Bendahara	1	0	0
3	Pengelola Keuangan	1	0	0
4	Pegadministrasi Umum	0	0	15
5	Analisis Perencanaan	1	0	0
6	Pengelola Bahan Perencanaan	1	0	0
7	Analisis Tata Ruang	1	0	0
8	Pengelola Geospasial	1	0	0
9	Analisis Perencanaan Anggaran	1	0	0
10	Penyusun Bahan Penyelenggaraan Litbang	1	0	0
11	Analisis Penelitian dan Pengembangan	1	0	0
JUMLAH		43	2	15

Table 1 Pegawai Bappeda Tahun 2023

c) Isu Strategis

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 dan didasarkan hasil analisis lingkungan strategis eksternal dan internal serta perhatian khusus, isu strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor yaitu :

- 1) Perencanaan pembangunan partisipatif, permasalahannya perencanaan pembangunan daerah berbasis masyarakat masih belum dapat mengakomodir sepenuhnya usulan dari masyarakat;
- 2) Perencanaan pembangunan yang holistik, terintegrasi dan mengarah pada konektivitas secara spasial serta berkelanjutan, permasalahannya:
 - a. Pembangunan daerah masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya terintegrasi lintas sektor;
 - b. Pembangunan daerah masih belum berkesinambungan.
- 3) Perencanaan pembangunan berbasis kinerja, permasalahannya perencanaan pembangunan daerah masih belum seluruhnya berorientasi pada hasil (outcome).

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD), adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah 5 (lima) tahunan, sehubungan adanya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024, maka dilakukan perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 57 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019-2024.

Dalam mendukung visi Kota Bogor tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor menjabarkan dalam 2 tujuan, 3 sasaran strategis dan 6 indikator sasaran.

Tabel 2.1
Penjabaran Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang kreatif dan inovatif	Kategori Inovasi Daerah	Meningkatnya Kreativitas, Inovasi, dan peran litbang dalam pengambilan Kebijakan Pembangunan Daerah	Kategori Inovasi Daerah
			Indeks Kualitas Kebijakan
			Persentase Rekomendasi Hasil Litbang yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan daerah yang Partisipatif, Holistik, Sinergis, Terintegrasi dan Mengarah Kepada Konektifitas Secara Spasial Serta Berkelanjutan Sebagai Bagian dari Perwujudan Reformasi Birokrasi	Nilai hasil evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota	Meningkatnya capaian kinerja, sinergitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah	Nilai hasil evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota
	Indeks Reformasi Birokrasi tingkat Perangkat Daerah		Persentase Indikator kinerja sasaran pembangunan daerah yang mencapai target
			Meningkatnya tata kelola Bappeda yang efektif, efisien dan akuntabel

Table 2 Penjabaran Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor

B. PERJANJIAN KINERJA

Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen pernyataan/ kesepakatan/perjanjian kinerja antara pimpinan dan staf untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan suatu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran.

Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2019 – 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2023 sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 36 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 79 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Bogor Tahun 2023. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dibuat sebagai bentuk komitmen pimpinan dalam pencapaian target kinerja pembangunan.

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kreativitas, Inovasi, dan peran Litbang dalam pengambilan Kebijakan Pembangunan Daerah	Kategori Inovasi daerah	Kategori	Inovatif
		Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks	Sedang
		Persentase Rekomendasi Hasil Litbang yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	Persen	85
2	Meningkatnya capaian kinerja, sinergitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah	Nilai hasil evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota	Nilai	25
		Persentase Indikator kinerja sasaran pembangunan daerah yang mencapai target	Persen	80,65
3	Meningkatnya tatakelola Bappeda yang efektif, efisien dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi tingkat Perangkat Daerah	Indeks	81

Table 3 Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor

C. RENCANA ANGGARAN

Pada Tahun Anggaran 2023 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 21.973.582.783.- (Dua Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuha Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) yang digunakan untuk membiayai Belanja Operasi dan Belanja Modal. Secara rinci Anggaran Belanja Operasi dan Belanja Modal Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor pada Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3
Rencana Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
Bogor Tahun 2023

No.	Uraian	Rencana (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Belanja Operasi	21.703.392.083	20.891.067.785	96,26
2	Belanja Modal	270.190.700	263.272.350	97,44
JUMLAH		21.973.582.783	21.154.340.135	96,27

Table 4 Rencana Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2023

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Sistem akuntabilitas kinerja pemerintah bertujuan untuk membangun pemerintah yang akuntabel dan terukur serta mampu mempertanggungjawabkan hasil atau manfaat kerjanya bagi masyarakat termasuk atas penggunaan anggaran yang dikelolanya.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas kinerja perangkat daerah dapat dilakukan melalui pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, yaitu pembangunan diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik. Hal ini mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara

penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91 ≤	Sangat Tinggi	
2	76 ≤ 90	Tinggi	
3	66 ≤ 75	Sedang	
4	51 ≤ 65	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Table 5 Skala Nilai Peringkat Kinerja

Capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor tercermin dari capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Renstra/Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian kinerja tersebut merupakan buah dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi dalam pelayanan publik serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Capaian kinerja sasaran strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor pada Tahun 2023 sebanyak 4 indikator mencapai target atau lebih dan sebanyak 2 indikator tidak mencapai target. Secara rinci capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Data Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2023

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%) (Realisasi/Target*100)
1	Meningkatnya Kreativitas, Inovasi, dan peran Litbang dalam pengambilan Kebijakan Pembangunan Daerah	Kategori Inovasi daerah	Kategori	Inovatif	Inovatif	100
		Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks	Sedang	Baik	100
		Persentase Rekomendasi Hasil Litbang yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	Persen	85	100	117,65
2	Meningkatnya capaian kinerja, sinergitas dan keberlanjutan	Nilai hasil evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota	Nilai	25	24,05	96,2

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%) (Realisasi/Target*100)
	n perencanaan pembangunan daerah	Persentase Indikator kinerja sasaran pembangunan daerah yang mencapai target	Persen	80,65	70,97	88,00
3	Meningkatnya tatakelola Bappeda yang efektif, efisien dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi tingkat Perangkat Daerah	Indeks	81	89,8	110,9

Table 6 Data Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2023

Sasaran 1 : Meningkatnya Kreativitas, Inovasi dan Peran Litbang Dalam Pengambilan Kebijakan Pembangunan Daerah

Tabel 3.3

Data Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kreativitas, Inovasi dan Peran Litbang Dalam Pengambilan Kebijakan Pembangunan Daerah

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	%	Realisasi Tahun 2022	Kenaikan / Penurunan	Target Akhir Renstrana	%	Realisasi Provinsi	Realisasi Nasional
Meningkatnya Kreativitas, Inovasi, dan peran Litbang dalam pengambilan Kebijakan Pembangunan Daerah	Kategori Inovasi daerah	Inovatif	Inovatif	100	Inovatif	-	Inovatif	100	Sangat Inovatif	Kurang Inovatif
	Indeks Kualitas Kebijakan	Sedang	Baik	100	Baik	-	Sedang	100	Sangat Baik	
	Persentase Rekomendasi Hasil Litbang yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	85	100	117,65	80	20	50	50	NA	NA

Table 7 Data Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kreativitas, Inovasi dan Peran Litbang Dalam Pengambilan Kebijakan Pembangunan Daerah

Sumber: Bidang Litbang

Cara perhitungan:

1. Total Score Penilaian Inovasi/Jumlah Inovasi (Dasar Penetapan oleh Kemendagri)
2. Hasil Pengukuran IKK oleh Lembaga Administrasi Negara
3. Jumlah hasil litbang yang ditindak lanjuti menjadi kebijakan dibagi jumlah seluruh Hasil Litbang x 100

Tabel 3.4

Capaian Program yang mendukung Sasaran Meningkatnya Kreativitas, Inovasi dan Peran Litbang Dalam Pengambilan Kebijakan Pembangunan Daerah

Program	Indikator Program	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian (%)	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian (%)	Target 2024
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Rekomendasi Hasil Litbang yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	50	80	160	85	100	117,65	100
	Persentase Inovasi Perangkat Daerah yang di implementasikan dan berkelanjutan	68	87,44	128,59	90	63	70,00	92,50

Program	Indikator Program	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian (%)	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian (%)	Target 2024
	Persentase inovasi masyarakat yang menunjang visi misi Kota Bogor	36	95,41	265,03	96,5	96,7	100,21	97,5
	Jumlah kampung tematik/kampung wisata	2	3	150	2	7	350,00	2

Table 8 Capaian Program yang mendukung Sasaran Meningkatkan Kreativitas, Inovasi dan Peran Litbang Dalam Pengambilan Kebijakan Pembangunan Daerah

Dalam pelaksanaannya sasaran ini di dukung oleh Program Penelitian dan Pengembangan. Pada Tahun 2023 alokasi anggaran yang telah di anggarkan untuk mendukung tercapainya setiap indikator sasaran sebesar Rp. 2.305.387.540, dengan realisasi sebesar Rp. 2.225.102.700 atau sebesar 96.52%, adapun efisiensi anggaran atas capaian indikator diatas sebesar 3.48% atau setara dengan Rp. 80.284.840.

Indeks Inovasi Daerah merupakan himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pelaksanaan penilaian Indeks Inovasi Daerah dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Fungsi Indeks Inovasi Daerah dalam mendukung reformasi birokrasi pemerintahan daerah adalah sebagai pusat data inovasi daerah berdasarkan aplikasi indeks inovasi daerah, sebagai sarana pelaporan inovasi daerah, sebagai instrument pengukuran inovasi daerah, untuk penghitungan tambahan penghasilan pegawai daerah, dan bahan untuk penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-6287 Tahun 2023 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2023, Kota Bogor mendapat peringkat ke-33 se-Indonesia dengan nilai indeks inovasi 56,82 yang masuk dalam kategori Inovatif. Adapun jumlah inovasi yang diinput sebanyak 61 inovasi yang berasal dari berbagai Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Provinsi Jawa Barat mendapatkan peringkat ke-4 se-Indonesia dengan nilai Indeks Inovasi 74,77 yang masuk dalam kategori Sangat Inovatif, bila disandingkan dengan Provinsi Jawa Barat capaiannya masih lebih rendah, di angka 75.99%. Pada tahun 2023 indeks inovasi Indonesia sebesar 30,3 point, indeks tersebut menempatkan Indonesia berada di peringkat 61, hasil penilaian inovasi tersebut tidak dapat di sandingkan dengan hasil penilaian indeks inovasi Provinsi dan Kabupaten/Kota dikarenakan adanya perbedaan pada kategori yang di ukur.

Dari hasil evaluasi penilaian tahun 2023 terdapat beberapa inovasi yang mengalami penurunan kualitas dari sisi kematangannya yang di sebabkan karena kurangnya dukungan dari pimpinan pada masing - masing perangkat

daerah, selain itu tidak adanya pegawai yang benar – benar menangani inovasi di perangkat daerahnya yang menyebabkan tidak terurusnya administrasi dan kurangnya bukti dukung pada saat penilaian IGA dan pada saat pegawai yang melakukan inovasi mendapatkan promosi/rotasi, inovasi pada perangkat daerah tersebut tidak berjalan. Agar inovasi pada perangkat daerah terus berjalan perlu adanya komitmen dari pimpinan setiap perangkat daerah agar dapat menggerakkan seluruh Tim yang ada pada masing – masing unit kerjanya.

Karena adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah Kota Bogor dalam memberikan akses ataupun kesempatan atas inovasi yang lahir dari masyarakat melalui pelaksanaan lomba Bogor Innovation Award (BIA) dan pemberian penghargaan, juga dukungan dari Perangkat Daerah dalam melakukan pembinaan terhadap inovasi serta adopsi inovasi Perangkat Daerah untuk diterapkan di masyarakat. Dalam pelaksanaannya lomba BIA tahun 2023 diikuti oleh 134 inovator/peserta yang melakukan registrasi, setelah dilaksanakan verifikasi administrasi, terdapat 7 inovator/peserta yang tidak memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti tahap penilaian oleh Tim juri lomba BIA. Perlombaan ini dibagi menjadi 10 bidang inovasi yaitu :

1. Energi terbarukan;
2. Pangan dan agribisnis;
3. Teknologi Informasi dan Komunikasi;
4. Air Minum, Kebersihan dan Lingkungan Hidup;
5. Transportasi Ramah Lingkungan;
6. Pendidikan;
7. Kerajinan Rumah Tangga;
8. Sosial;
9. Ekonomi Hijau;
10. Kesehatan dan Obat – obatan.

Selain itu lomba BIA juga dibagi menjadi 5 kategori, dimana masing-masing kategori ditetapkan 6 pemenang, untuk lebih jelasnya pemenang dari masing-masing kategori dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.5
Kategori Pelajar SMP/MTS Sederajat

Nama Inovasi	Juara	Instansi
Tissue choedamam pereda demam dan salep kulit choerocen berbahan dasar kalanchoe pinnata (cocor bebek)	Juara 1	SMPN 10 Kota Bogor
Lotion diospyros anti nyamuk herbal (lostimuba)	Juara 2	SMPN 6 Kota Bogor
Pemanfaatan lidah buaya [aloe barbadensis milleer] sebagai alternatif bahan baku gelatin herbal [getravaera]	Juara 3	SMPN 6 Kota Bogor
Pemanfaatan limbah air wudhu untuk budidaya secara aquaponik	Juara harapan 1	SMPN 4 Kota Bogor

Nama Inovasi	Juara	Instansi
Pemanfaatan daun pohpohan (pilea melastomoides) sebagai alternatif body lotion alami (losamela)	Juara harapan 2	SMPN 6 Kota Bogor
Yoghurt belimbing wuluh dengan chia seed dan manisan belimbing wuluh	Juara harapan 3	SMPN 4 Kota Bogor

Table 9 Kategori Pelajar SMP/MTS Sederajat

Tabel 3.6

Kategori Pelajar SMA/SMK/MA Sederajat

Nama Inovasi	Juara	Instansi
Smart Trash (Tempat Sampah Pintar)	Juara 1	SMKN 4 Kota Bogor
Teleskop Penerbangan	Juara 2	SMX School of Makers
AR Design	Juara 3	SMX School of Makers
Desa Digital Project	Juara harapan 1	SMA Kesatuan Bogor
Smart attendance system' with AI based blink verification	Juara harapan 2	SMAN 3 Kota Bogor
Masker berbahan kertas atsiri dan karbon aktif	Juara harapan 3	SMK - SMAK Bogor

Table 10 Kategori Pelajar SMA/SMK/MA Sederajat

Tabel 3.7

Kategori Perguruan Tinggi/Lembaga/Pelaku Usaha

Nama Inovasi	Juara	Instansi
Layanan 3 in 1 SMS	Juara 1	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor
SiBadra	Juara 2	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor
Datawarehouse	Juara 3	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor
Cassava Black Frozen Dough Pizza	Juara harapan 1	Pelaku Usaha
Aplikasi Satu Data Kebencanaan	Juara harapan 2	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor
"Eco-Nusa Plus" pupuk organik cair limbah tahu	Juara harapan 3	Universitas Nusa Bangsa

Table 11 Kategori Perguruan Tinggi/Lembaga/Pelaku Usaha

Tabel 3.8

Kategori Masyarakat

Nama Inovasi	Juara	Instansi
Pasar Dongko	Juara 1	Masyarakat
Kurikulum homeschooling qia kids	Juara 2	Masyarakat
Batatas bites ala millennial untuk peningkatan penyerapan ubi jalar petani lokal	Juara 3	Masyarakat
Pengembangan Augmented Reality (AR) pada filter Instagram untuk meningkatkan keterampilan mengingat rumus materi getaran dan gelombang peserta didik di SMP Negeri 7 Bogor	Juara harapan 1	Masyarakat
Produk Ihrom Halal	Juara harapan 2	Masyarakat

Nama Inovasi	Juara	Instansi
Sabun lerak "Nadzifa".	Juara harapan 3	Masyarakat

Table 12 Kategori Masyarakat

Tabel 3.9

Kategori Aparatur Sipil Negara (ASN)

Nama Inovasi	Juara	Instansi
Posrem 5.0 (Posyandu Remaja Dalam Perspektif Society 5.0)	Juara 1	UPTD Puskesmas Gang Aut Kota Bogor
Smart Merapat	Juara 2	DPMPSTP Kota Bogor
Aplikasi Simpela B3	Juara 3	Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor
SIKELUPAS	Juara harapan 1	UPTD Puskesmas Pondok Rumpit Kota Bogor
Multimedia LASAMBA	Juara harapan 2	SMPN 8 Kota Bogor
SIGAPADIMAS	Juara harapan 3	UPTD Puskesmas Bogor Timur Kota Bogor

Table 13 Kategori Aparatur Sipil Negara (ASN)

Berdasarkan hasil juara pada table di atas kemudian dilakukan asesment sebanyak 36 inovasi untuk di fasilitasi sertifikasi HKI, namun pada saat pelaksanaan fasilitasi HKI hanya 12 inovasi yang diajukan dan lolos mendapatkan sertifikasi HKI dari Kementerian Hukum dan HAM. Berikut dokumentasi penyelenggaraan Bogor Innovation Award :



Capaian Indikator Persentase rekomendasi hasil litbang yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan di Tahun 2023 adalah 100% bila dibandingkan dengan capaian di Tahun 2022 sebesar 80% terjadi kenaikan

sebesar 20% atau bila dibandingkan dengan target di akhir RPJMD capaiannya sebesar 200%.

Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kota Bogor terus berupaya untuk mengedepankan hasil-hasil penelitian dan kajian dalam rangka menghasilkan rekomendasi kebijakan-kebijakan yang berkualitas. Pada Tahun 2023, terdapat 8 kajian yang telah dihasilkan oleh Bappeda Kota Bogor, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kajian Tenaga Kerja Kota Bogor Tahun 2023 yang ditindaklanjuti sebagai Bahan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) Kota Bogor yang akan disusun oleh Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024;
2. Kajian Kebijakan Pengelolaan Agroforestri Perkotaan di Kota Bogor yang ditindaklanjuti sebagai Bahan Penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor Tahun 2025-2026;
3. Kajian Destinasi Kampung Wisata Berbasis Komunitas yang ditindaklanjuti sebagai Bahan Pengembangan Kampung Tematik di Wilayah Kecamatan Bogor Utara, khususnya Kelurahan Cimahpar, oleh Dinas Pariwisata maupun OPD terkait serta aparat wilayah;
4. Kajian Urban Farming Menuju “*Food Security*” di Kota Bogor yang ditindaklanjuti sebagai Bahan Evaluasi Gerakan Bogor Berkebun yang sudah berjalan sejak Tahun 2020 dan sebagai nahan penyusunan Renstra DKPP tahun 2025-2026;
5. Kajian Antisipasi Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan di Kawasan Jalan Otista Kota Bogor Terhadap Pergerakan Lalu Lintas dan Pelayanan Angkutan Umum Orang, Barang dan Jasa yang ditindaklanjuti sebagai masukan bagi Pemerintah Kota Bogor dalam rekayasa Lalu Lintas sebagai akibat pembangunan Jalan Otista;
6. Kajian Risiko Bencana Kota Bogor Tahun 2023-2027 dan Kajian Rencana Penanggulangan Bencana Kota Bogor Tahun 2024 – 2028 yang ditindaklanjuti sebagai Bahan Penyusunan Renstra OPD terkait di Kota Bogor;

7. Kajian kesejahteraan keluarga dari Aspek Kesehatan Remaja yang ditindaklanjuti sebagai bahan atau referensi dalam Penyusunan Kajian Kebahagiaan Anak Muda/ Remaja Kota Bogor Tahun 2024;
8. Kajian Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika salah satu outputnya adalah Website Forum Anak Kota Bogor yang dimanfaatkan oleh Forum Anak Kota Bogor, dibawah binaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), sebagai media informasi, edukasi dan komunikasi oleh Anak2 se-Kota Bogor.

Seluruh kajian yang telah di susun pada tahun 2023 ditindaklanjuti menjadi rekomendasi kebijakan maka capaian Indikator Persentase rekomendasi hasil litbang yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan di Tahun 2023 adalah 100% bila dibandingkan dengan capaian di Tahun 2022 sebesar 80% terjadi kenaikan sebesar 20% atau bila dibandingkan dengan target di akhir RPJMD capaiannya sebesar 200%.

Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) adalah instrument untuk menilai kualitas kebijakan pemerintah yang dilihat dari proses pembuatan kebijakan dan bagaimana melakukan pengaturan agenda, formulasi, implementasi dan proses evaluasi. Pengukuran Nasional IKK tahun 2023 dilakukan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024. Dari hasil pengukuran IKK pada tahun 2023 yang dilakukan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Kota Bogor mendapatkan nilai sebesar 65 point Dimana nilai tersebut masuk dalam kategori “Baik”, bila di sandingkan dengan Provinsi Jawa Barat capaiannya masih lebih rendah di angka 74.4%, dimaan nilainya sebesar 87,36 point atau kategori “Sangat Baik”. Terdapat beberapa arahan dari Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan kebijakan, antara lain :

1. Dalam aspek substansi kebijakan perlu terus di tingkatkan adanya proses kajian dan analisis kebijakan dengan di dukung oleh data, informasi dan pengetahuan yang fluktual yang relevan dengan kondisi dilapangan.
2. Pelibatan stakeholder dalam proses kebijakan publik perlu dilakukan secara lebih representatif termasuk dengan kelompok stakeholder di luar instansi dan kelompok rentan di lapangan.
3. Melakukan proses dokumentasi pengelolaan kebijakan yang telah dilakukan dari proses pengelolaan wacana publik, perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, dan evaluasi dampak kebijakan. Dokumentasi dilakukan oleh masing-masing organisasi perangkat daerah yang menjadi leading sektor kebijakannya.

4. Peningkatan dukungan sumber daya manusia yang kompeten untuk melaksanakan kegiatan kajian dan analisis kebijakan dalam seluruh proses kebijakan yang dilakukan. Sumberdaya manusia yang kompeten dapat berasal dari internal atau pun dari eksternal instansi pemerintah. Salah satu sumberdaya internal yang potensial misalnya optimalisasi peran Analisis Kebijakan yang telah dilantik di instansi.

Upaya – upaya yang telah dilakukan Bappeda selama tahun 2023 untuk mendukung pencapaian kinerja sasaran di jabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Pemilik Kinerja	Sasaran	Aktivitas	Nama Tim	Ketua Tim dan Anggota
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor	Meningkatnya Kreativitas, Inovasi, dan peran Litbang dalam pengambilan Kebijakan Pembangunan Daerah			
Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah		Penyusunan dokumen Kajian Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Tim Kerja Kajian Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Ketua Tim : Oni Hidayati, S.Pi., M.Si. Anggota : 1. Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah 2. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah 3. Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Wilayah 4. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 5. Azhar Ginandjar, A.S. S.T., S.Sos., M.M. 6. Drie Sarwiedi S. S.P., M.Si. 7. Ratu Desy Savitri, S.T., M.T. 8. Dwi Hari Wibowo, S.Kom. 9. Erni Solikhati, S.E. 10. Yeyen Esva Respati, S.E., M.Ec.Dev. 11. Uvi Mitra Vienny, S.E. Ak., M.E. 12. Fitri Hidayati, S.E. 13. Muhammad Azzam, A.Md. 14. Ratih Gustiani S.Si., M.M.
		Jumlah Dokumen Penyusunan KRB dan RPB Kota Bogor	Tim Kerja Penyusunan KRB dan RPB Kota Bogor	Ketua Tim : Oni Hidayati, S.Pi., M.Si. Anggota : 1. Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah 2. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah 3. Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Wilayah 4. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 5. Azhar Ginandjar, A.S. S.T., S.Sos., M.M. 6. Drie Sarwiedi S. S.P., M.Si. 7. Ratu Desy Savitri, S.T., M.T. 8. Dwi Hari Wibowo, S.Kom. 9. Erni Solikhati, S.E. 10. Yeyen Esva Respati, S.E., M.Ec.Dev. 11. Uvi Mitra Vienny, S.E. Ak., M.E. 12. Fitri Hidayati, S.E. 13. Muhammad Azzam, A.Md. 14. Ratih Gustiani S.Si., M.M.
		Penyusunan dokumen Kajian Bidang Transportasi dan Perhubungan	Tim Kerja Kajian Bidang Transportasi dan Perhubungan	Ketua Tim : Ratu Desy Savitri, S.T., M.T. Anggota : 1. Oni Hidayati, S.Pi., M.Si. 2. Drie Sarwiedi S. S.P., M.Si. 3. Dwi Hari Wibowo, S.Kom. 4. Lusi Nurbaiti Badri, S.T., M.Si. 5. Imam Santoso, S.E., M.M. 6. Gandi Aria Wijaya, S.P., M.Si. 7. Inolasari, S.T., M.T. 8. Sumaryanto, S.Pd., M.Si. 9. Ridwan Adithiansyah, S.T. 10. Fitri Hidayati, S.E. 11. Erni Solikhati, S.E.

Pemilik Kinerja	Sasaran	Aktivitas	Nama Tim	Ketua Tim dan Anggota
		Penyusunan dokumen Kajian Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Tim Kerja Kajian Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Ketua Tim : Lusi Nurbaiti Badri, S.T., M.Si. Anggota : 1. Drie Sarwiedi S. S.P., M.Si. 2. Oni Hidayati, S.Pi., M.Si. 3. Ratu Desy Savitri, S.T., M.T. 4. Erni Solikhati, S.E. 5. Gandi Aria Wijaya, S.P., M.Si. 6. Imam Santoso, S.E., M.M. 7. Dadang Komarudin, S.E., M.M. 8. Dwi Udayani Retnaningtyas, S.Hut. 9. Ati Fatimah, S.IP. 10. Bayu Wijoseno, S.Kom. 11. Dwi Hari Wibowo, S.Kom.
		Penyusunan dokumen Kajian Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Tim Kerja Kajian Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Ketua Tim : Ratu Desy Savitri, S.T., M.T. Anggota : 1. Oni Hidayati, S.Pi., M.Si. 2. Drie Sarwiedi S. S.P., M.Si. 3. Dwi Hari Wibowo, S.Kom. 4. Lusi Nurbaiti Badri, S.T., M.Si. 5. Imam Santoso, S.E., M.M. 6. Gandi Aria Wijaya, S.P., M.Si. 7. Inolasari, S.T., M.T. 8. Sumaryanto, S.Pd., M.Si. 9. Ridwan Adithiansyah, S.T. 10. Fitri Hidayati, S.E. 11. Erni Solikhati, S.E.
		Penyusunan dokumen Kajian Kesejahteraan Keluarga dari aspek Kesehatan Remaja	Tim Kerja Kajian Kesejahteraan Keluarga dari aspek Kesehatan Remaja	Ketua Tim : Lusi Nurbaiti Badri, S.T., M.Si. Anggota : 1. Drie Sarwiedi S. S.P., M.Si. 2. Oni Hidayati, S.Pi., M.Si. 3. Ratu Desy Savitri, S.T., M.T. 4. Erni Solikhati, S.E. 5. Gandi Aria Wijaya, S.P., M.Si. 6. Imam Santoso, S.E., M.M. 7. Dadang Komarudin, S.E., M.M. 8. Dwi Udayani Retnaningtyas, S.Hut. 9. Ati Fatimah, S.IP. 10. Bayu Wijoseno, S.Kom. 11. Dwi Hari Wibowo, S.Kom.
		Penyusunan dokumen Kajian Tenaga Kerja	Tim Kerja Kajian Kajian Tenaga Kerja	Ketua Tim : Ratu Desy Savitri, S.T., M.T. Anggota : 1. Oni Hidayati, S.Pi., M.Si. 2. Drie Sarwiedi S. S.P., M.Si. 3. Dwi Hari Wibowo, S.Kom. 4. Lusi Nurbaiti Badri, S.T., M.Si. 5. Imam Santoso, S.E., M.M. 6. Gandi Aria Wijaya, S.P., M.Si. 7. Inolasari, S.T., M.T. 8. Sumaryanto, S.Pd., M.Si. 9. Ridwan Adithiansyah, S.T. 10. Fitri Hidayati, S.E. 11. Erni Solikhati, S.E.
		Penyusunan dokumen Kajian Kampung Wisata berbasis komunitas	Tim Kerja Kajian Kampung Wisata berbasis komunitas	Ketua Tim : Ratu Desy Savitri, S.T., M.T. Anggota : 1. Oni Hidayati, S.Pi., M.Si. 2. Drie Sarwiedi S. S.P., M.Si. 3. Dwi Hari Wibowo, S.Kom. 4. Lusi Nurbaiti Badri, S.T., M.Si. 5. Imam Santoso, S.E., M.M. 6. Gandi Aria Wijaya, S.P., M.Si. 7. Inolasari, S.T., M.T. 8. Sumaryanto, S.Pd., M.Si. 9. Ridwan Adithiansyah, S.T. 10. Fitri Hidayati, S.E. 11. Erni Solikhati, S.E.
		Penyusunan dokumen laporan Pelaksana Lomba Inovasi Jumlah dokumen laporan kegiatan KIJB dan KIPP	Tim Kerja Pelaksana Lomba Inovasi	Ketua Tim : Lusi Nurbaiti Badri, S.T., M.Si. Anggota : 1. Drie Sarwiedi S. S.P., M.Si. 2. Oni Hidayati, S.Pi., M.Si. 3. Ratu Desy Savitri, S.T., M.T. 4. Erni Solikhati, S.E. 5. Gandi Aria Wijaya, S.P., M.Si. 6. Imam Santoso, S.E., M.M. 7. Dadang Komarudin, S.E., M.M. 8. Dwi Udayani Retnaningtyas, S.Hut. 9. Ati Fatimah, S.IP. 10. Bayu Wijoseno, S.Kom. 11. Dwi Hari Wibowo, S.Kom.

Pemilik Kinerja	Sasaran	Aktivitas	Nama Tim	Ketua Tim dan Anggota
		Penyusunan produk inovasi Daerah yang difasilitasi HAKI	Tim Kerja Pelaksanaan Fasilitasi Sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual 2023	Ketua Tim : Lusi Nurbaiti Badri, S.T., M.Si. Anggota : 1. Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah 2. Oni Hidayati, S.Pi., M.Si. 3. Drie Sarwiedi S. S.P., M.Si. 4. Dwi Hari Wibowo, S.Kom. 5. Erni Solikhati, S.E. 6. Imam Santoso, S.E., M.M. 7. Gandi Aria Wijaya, S.P., M.Si. 8. Ratu Desy Savitri, S.T., M.T.

Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Kajian



Sasaran 2: Meningkatnya capaian kinerja, sinergitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah

Tabel 3.10

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya capaian kinerja, sinergitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	%	Realisasi Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	Target Akhir Renstra	%	Provinsi	Nasional
Meningkatnya capaian kinerja, sinergitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah	Nilai hasil evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota	25	24,05	96,2	23,7	0,35	26	92,5	-	NA
	Persentase Indikator kinerja sasaran pembangunan daerah yang mencapai target	80,65	70,97	88,57	77,42	-6,45	73	97,22	-	NA

Table 14 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya capaian kinerja, sinergitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah

Sumber: Bidang PPEPD

Cara perhitungan:

1. Nilai hasil evaluasi perencanaan kinerja dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah oleh Kemenpan RB
2. Jumlah indikator kinerja sasaran yang mencapai target dibagi jumlah seluruh indikator kinerja sasaran x 100

Tabel 3.11

Capaian Program yang Mendukung Sasaran Meningkatnya capaian kinerja, sinergitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah

Program	Indikator Program	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian (%)	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian (%)	Target 2024
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase ketercapaian target sasaran perencanaan pembangunan daerah	69	77,42	112,20	80,65	70,97	88,00	83,87
	Nilai Hasil Evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota	24	23,7	98,75	25	24,05	96,20	26
	Persentase ketersediaan Data dan Informasi sesuai kebutuhan perencanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan	95	95	100,00	97,5	95	97,44	100
	Keterwakilan Masyarakat dalam Musrenbang Per 10.000 Penduduk	20	25,92	129,60	27,5	25,7	93,45	30
	Persentase program pembangunan daerah yang didanai dari CSR	12	32,12	267,67	35,77	36,5	102,04	39,42
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Rencana Pembangunan Daerah bidang Pembangunan Manusia dengan RPJPD, RPJMD, dan RKPD	79	79	100,00	82	86,97	106,06	85
	Persentase Keselarasan Rencana pembangunan Daerah bidang pemerintahan dengan RPJPD, RPJMD, dan RKPD	79	79	100,00	82	87,82	107,10	85
	Persentase keselarasan rencana pembangunan Daerah bidang perekonomian dan SDA dengan RPJPD, RPJMD dan RKPD	79	79	100,00	82	92,1	112,32	85
	Persentase Keselarasan Rencana pembangunan Daerah bidang Infrastruktur dan Wilayah dengan RPJPD, RPJMD, dan RKPD	79	79	100,00	82	91,23	111,26	85
	Persentase ketercapaian target perencanaan pembangunan daerah Bidang pembangunan manusia	69	77,72	112,64	80	69,44	86,80	82,67
	Persentase ketercapaian target perencanaan pembangunan daerah Bidang pemerintahan	69	75,67	109,67	78,38	74	94,41	81,08
	Persentase ketercapaian target perencanaan pembangunan daerah Bidang perekonomian dan SDA	69	71,2	103,19	75,32	75,76	100,58	80,52
	Persentase ketercapaian target perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur dan Wilayah	69	66,27	96,04	71	71,67	100,94	73

Table 15 Capaian Program yang Mendukung Sasaran Meningkatnya capaian kinerja, sinergitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah

Dalam pelaksanaannya sasaran ini di dukung oleh Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, dan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Pada Tahun 2023 alokasi anggaran yang telah dianggarkan untuk mendukung tercapainya setiap indikator sasaran sebesar Rp. 4.191.237.808, dengan realisasi sebesar Rp. 3.999.318.600 atau sebesar 95.42%, adapun efisiensi anggaran atas capaian indikator diatas sebesar 4.58% atau setara dengan Rp. 191.919.208.

Sesuai dengan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kota Bogor Tahun 2023 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/310/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023, bahwa Pemerintah Kota Bogor memperoleh nilai sebesar **76.73** atau predikat **BB**, hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “**Sangat Baik**”, dimana implementasi SAKIP sudah sangat baik pada Pemerintah daerah dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari hasil rincian evaluasi sebagai berikut:

Tabel 3.12

Rincian Evaluasi SAKIP Kota Bogor Tahun 2023

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT	NILAI
1	Perencanaan Kinerja	30	24,05
2	Pengukuran Kinerja	30	24,55
3	Pelaporan Kinerja	15	11,19
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16,94
Nilai Hasil Evaluasi		100	76,73
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB

Table 16 Rincian Evaluasi SAKIP Kota Bogor Tahun 2023

Pada tabel di atas dapat kita lihat untuk komponen perencanaan kinerja Kota Bogor memperoleh nilai sebesar 24,05 poin, dimana mengalami kenaikan sebesar 0,35 poin dari tahun 2022, meskipun mengalami kenaikan tetapi nilai tersebut masih berada di bawah target capaian yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan RPJMD tahun 2019-2024 yaitu sebesar 25 poin. Dari hasil evaluasi SAKIP Kota Bogor tahun 2023 terdapat rekomendasi yang di berikan, yaitu :

1. Melakukan penyempurnaan dokumen perencanaan level Kota, dan memastikan hasil penyempurnaan tersebut tertuang dengan baik dalam penetapan RPJMD tahun berikutnya agar tujuan/sasaran strategis beserta indikatornya berorientasi pada hasil;
2. Menggunakan hasil penyempurnaan tersebut untuk menjabarkan kinerja mulai dari level Wali Kota sampai level individu sehingga tercipta keselarasan dan mendorong tercapainya kinerja organisasi dengan memastikan kesesuaian antara sasaran, indikator maupun target yang ditetapkan;
3. Melakukan reviu terhadap program dan kegiatan agar seluruhnya mendukung tercapainya sasaran strategis dan prioritas pembangunan daerah;

Seluruh rekomendasi tersebut menjadi kedepannya akan menjadi acuan sebagai bahan penyusunan rencana tindak lanjut evaluasi SAKIP.

Monitoring dan evaluasi kinerja merupakan kegiatan untuk menilai keberhasilan, efisiensi, efektifitas, relevansi, dampak dan keberlanjutan pelaksanaan Program/Kegiatan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam Renstra PD dan RPJMD, selain itu evaluasi dapat dilakukan pada saat penyusunan rencana, pelaksanaan rencana maupun setelah program/kegiatan selesai dilaksanakan, rincian hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi indikator sasaran RPJMD 2019-2024 Kota Bogor di tahun 2023 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.13

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Tahun 2019-2024

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) dari Sasaran Strategik RPJMD	Satuan	2023		%
			Target	Realisasi	
1	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	74,15	74,85	100
2	Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	%	71,00	71,53	100
3	Angka Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga	Angka	57	57,3	100
4	Persentase Rumah tangga yang terlayani air minum yang layak	%	84,72	91,91	100
5	Persentase Rumah tangga yang terlayani air minum yang aman	%	69,32	76,57	100
6	Persentase rumah tangga yang terlayani sistem air limbah yang layak	%	74,01	73,58	99,26
7	Persentase rumah tangga yang terlayani sistem air limbah yang aman	%	7,88	5,49	69,80
8	Persentase Luasan kawasan kumuh kewenangan kota	%	1,94	2,02	96,04
9	Persentase Reduksi Sampah	%	7,80	7,81	100
10	Indeks Kualitas Air	Angka	37,17	46,67	100
11	Indeks Kualitas Udara	Angka	79,72	95,92	100
12	Prosentase Ruang Terbuka Hijau Publik	%	4,24	4,23	99,76
13	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,74	10,64	99,07
14	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,83	13,45	97,25
15	Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	65,19	NA	100
16	Indeks Inovasi Daerah	Angka			
		Kategori	Inovatif	Inovatif	100

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) dari Sasaran Strategik RPJMD	Satuan	2023		%
			Target	Realisasi	
17	Indeks Pemberdayaan Gender	Angka	72,50	72,56*	100,08
18	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	79,16	79,98	101,03
19	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	A	A	100
20	Level Kematangan Smart City	Level	Integrative	Integrative	100
21	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	10,56	9,39	100
22	Angka Kemiskinan	%	6,56	6,67	98,35
23	Indeks Ketahanan Keluarga	Angka	85,20	85,20	100
24	PDRB (Atas Dasar Harga Konstan)	Trilyun Rp.	36.950	37,055	100,28
25	PDRB Perkapita (Atas Dasar Harga Berlaku)	Juta Rp	49,84	53,24	106,92
26	Pengeluaran Per Kapita	Ribu Rp	12090	12656	100
27	Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit	%	24,00	17,75	73,95
28	Persentase Realisasi Rencana Struktur Ruang (Periode Rencana 2020-2024)	%	80	80	100
29	Persentase Realisasi Rencana Pola Ruang (Periode Rencana 2020-2024)	%	80	80	100
30	Persentase Jalan Berkondisi Baik	%			
	Persentase Jalan Berkondisi Mantap	%	88,50	88,95	100,5
31	Persentase Cakupan Pelayanan Angkutan Umum	%	44	60,07	136,52

Table 17 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Tahun 2019-2024

Dari tabel diatas dapat dilihat realisasi capaian Indikator kinerja sasaran RPJMD Kota Bogor di tahun 2023 sebesar 70,97%, capaian ini mengalami penurunan sebesar -6,45% dari tahun 2022, diama dari 31 target indikator sasaran terdapat 22 indikator yang mencapai target dan 9 yang tidak mencapai target, capaian tersebut lebih rendah dari target capaian yang telah di tetapkan dalam dokumen Perrubahan RPJMD tahun 2019-2024 yaitu sebesar 80,65%. Dari hasil LHE SAKIP tahun 2023 terdapat beberapa temuan Kondisi hasil evaluasi pada komponen perencanaan, yaitu:

1. Terdapat rumusan sasaran strategis serta indikator yang belum berorientasi hasil serta kurang merepresentasikan isu strategis PD. Contoh pada Dinas Sosial dengan sasaran "Meningkatkan kunjungan ke taman makam pahlawan" dengan indikator "persentase kunjungan ke taman makan pahlawan" dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan data dan informasi kependudukan dengan indikator "Persentase pengelolaan data dan informasi kependudukan".
2. Penjabaran kinerja belum menggambarkan kerangka logis dalam mencapai kinerja, sehingga terjadi ketidakselarasan penjabaran kinerja organisasi dengan kinerja individu;
3. Terdapat perbedaan indikator kinerja pada sebagian PK PD dengan manual IKU. Contoh pada Dinas Perhubungan, pada IKU terdapat 6 indikator kinerja sedangkan di PK 2023 hanya 2 indikator;
4. Terdapat target 2023 yang dibawah realisasi Tahun 2022. Contoh pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan pada indikator "Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Seni dan Budaya", dimana realisasi capaian kinerja mencapai 30,84% di tahun 2022, namun pada penetapan target PK 2023 hanya ditetapkan sebesar 8,00%;
5. Penetapan program dan kegiatan belum sepenuhnya berfokus pada pencapaian sasaran strategis, sehingga masih terdapat program dan kegiatan yang dilaksanakan tidak sepenuhnya relevan untuk mencapai prioritas pembangunan daerah.

Selain hasil temuan kondisi tersebut tersebut, Kemempan RB juga memberikan rekomendasi, yaitu :

1. Melakukan penyempurnaan dokumen perencanaan level Kota, dan memastikan hasil penyempurnaan tersebut tertuang dengan baik dalam penetapan RPJMD tahun berikutnya agar tujuan/sasaran strategis beserta indikatornya berorientasi pada hasil;

2. Menggunakan hasil penyempurnaan tersebut untuk menjabarkan kinerja mulai dari level Wali Kota sampai level individu sehingga tercipta keselarasan dan mendorong tercapainya kinerja organisasi dengan memastikan kesesuaian antara sasaran, indikator maupun target yang ditetapkan;
3. Melakukan reviu terhadap program dan kegiatan agar seluruhnya mendukung tercapainya sasaran strategis dan prioritas pembangunan daerah.

Dalam rangka pencapaian target kinerja dalam RPJMD dan Renstra PD, Setiap tahun proses perbaikan secara terus menerus dilakukan oleh Bappeda dengan memperhatikan hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pada tahun 2023 salah satu yang telah dilaksanakan adalah penyesuaian target kinerja pada tahun 2023 – 2024, dimana target yang realisasinya telah mencapai/melebihi target. Selain penyesuaian target pada saat penyusunan Rencana Pemerintah Daerah (RPD) Kota Bogor tahun 2025-2026 telah dilakukan juga penjabaran kinerja disetiap levelnya secara berjenjang serta memperhatikan keselarasan antara kegiatan, program dan sasaran strategis sehingga anggaran yang digunakan efektif untuk pencapaian kinerja dalam Renstra PD ataupun RPJMD.

Upaya – upaya yang telah dilakukan Bappeda selama tahun 2023 untuk mendukung pencapaian kinerja sasaran di jabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Pemilik Kinerja	Sasaran	Aktivitas	Nama Tim	Ketua Tim dan Anggota
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor	Meningkatnya capaian kinerja, sinergitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah			

Pemilik Kinerja	Sasaran	Aktivitas	Nama Tim	Ketua Tim dan Anggota
Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		Pelaksanaan Konsultasi Publik RKPD 2024	Tim Kerja Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045	<p>Ketua : Inolasari ST, MT (Perencana Ahli Madya)</p> <p>Anggota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor 2. Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Wilayah 3. Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah 4. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 5. Sakti Aditya S.H., M.M (Perencana Ahli Muda) 6. Eko Setyo Utomo S.Sos., M.Si (Perencana Ahli Muda) 7. Ratih Gustiani S.Si. MM (Perencana Ahli Muda) 8. Ati Fatimah S.IP (Perencana Ahli Muda) 9. Herbowo Anggun Putra S.Kom (Pranata Komputer Ahli Muda) 10. Agus Munawar Diansyah S.E. (Perencana Ahli Pertama) 11. Muhammad Syahal Setiawan S.T (Pranata Komputer Ahli Pertama) 12. Zain Fatehatul Mahawani S.T (Analisis Tata Ruang) 13. Andriansyah (Pengadministrasi Umum) 14. Azhar Ginandjar, A.S. S.T., S.Sos., M.M. (Perencana Ahli Madya) 15. Ratu Vivi Silviani, S.T., M.Si. (Perencana Ahli Muda) 16. Febby Lestari, S.P. (Perencana Ahli Muda) 17. Dwi Udayani Retnaningtyas, S.Hut. (Perencana Ahli Muda) 18. Abdul Haris, S.T. (Perencana Ahli Muda) 19. Ridwan Adithiansyah, S.T. (Perencana Ahli Pertama) 20. Muhammad Azzam, A.Md. (Pengelola Geospasial) 21. Fitri Hidayati, S.E. (Perencana Ahli Muda) 22. Bayu Wijoseno, S.Kom. (Perencana Ahli Muda) 23. Dadang Komarudin, S.E., M.M. (Perencana Ahli Muda) 24. Odih Sumirat, S.E., M.M. (Perencana Ahli Muda) 25. Sumaryanto, S.Pd., M.Si. (Perencana Ahli Muda) 26. Uvi Mitra Vienny, S.E. Ak., M.E. (Perencana Ahli Muda) 27. Yeyen Esva Respati, S.E., M.Ec.Dev. (Perencana Ahli Muda) 28. Apoh Ibrahim Saragih, S.E., M.S.E. (Analisis Pembangunan) 29. Rika Noor Ajjjah, S.Sos. (Analisis Perencanaan) 30. Drie Sarwiedi S. S.P., M.Si. (Perencana Ahli Madya) 31. Oni Hidayati S.Pi., M.Si (Analisis Kebijakan Ahli Muda) 32. Lusi Nurbaiti Badri S.T. M.Si (Analisis Kebijakan Ahli Muda) 33. Ratu Desy Savitri ST, MT (Perencana Ahli Muda) 34. Erni Solikhati S.E. (Perencana Ahli Muda)

Pemilik Kinerja	Sasaran	Aktivitas	Nama Tim	Ketua Tim dan Anggota
		Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Tahun 2024	Tim Kerja Forum Perangkat Daerah Tahun 2024	<p>Ketua : Eko Setyo Utomo S.Sos., M.Si (Perencana Ahli Muda)</p> <p>Anggota :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor 2. Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan 3. Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah 4. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 5. Inolasari ST, MT (Perencana Ahli Madya) 6. Sakti Aditya S.H., M.M (Perencana Ahli Muda) 7. Ratih Gustiani S.Si. MM (Perencana Ahli Muda) 8. Ati Fatimah S.IP (Perencana Ahli Muda) 9. Herbowo Anggun Putra S.Kom (Pranata Komputer Ahli Muda) 10. Agus Munawar Diansyah S.E. (Perencana Ahli Pertama) 11. Muhammad Syahal Setiawan S.T (Pranata Komputer Ahli Pertama) 12. Zain Fatehatul Mahawani S.T (Analisis Tata Ruang) 13. Andriansyah (Pengadministrasi Umum) 14. Azhar Ginandjar, A.S. S.T., S.Sos., M.M. (Perencana Ahli Madya) 15. Ratu Vivi Silviani, S.T., M.Si. (Perencana Ahli Muda) 16. Febby Lestari, S.P. (Perencana Ahli Muda) 17. Dwi Udayani Retnaningtyas, S.Hut. (Perencana Ahli Muda) 18. Abdul Haris, S.T. (Perencana Ahli Muda) 19. Ridwan Adithiansyah, S.T. (Perencana Ahli Pertama) 20. Muhammad Azzam, A.Md. (Pengelola Geospasial) 21. Fitri Hidayati, S.E. (Perencana Ahli Muda) 22. Bayu Wijoseno, S.Kom. (Perencana Ahli Muda) 23. Dadang Komarudin, S.E., M.M. (Perencana Ahli Muda) 24. Odih Sumirat, S.E., M.M. (Perencana Ahli Muda) 25. Sumaryanto, S.Pd., M.Si. (Perencana Ahli Muda) 26. Uvi Mitra Vienny, S.E. Ak., M.E. (Perencana Ahli Muda) 27. Yeyen Esva Respati, S.E., M.Ec.Dev. (Perencana Ahli Muda) 28. Apoh Ibrahim Saragih, S.E., M.S.E. (Analisis Pembangunan) 29. Rika Noor Ajjjah, S.Sos. (Analisis Perencanaan) 30. Drie Sarwiedi S. S.P., M.Si. (Perencana Ahli Madya) 31. Oni Hidayati S.Pi., M.Si (Analisis Kebijakan Ahli Muda) 32. Lusi Nurbaiti Badri S.T. M.Si (Analisis Kebijakan Ahli Muda) 33. Ratu Desy Savitri ST, MT (Perencana Ahli Muda) 34. Erni Solikhati S.E. (Perencana Ahli Muda) 35. Imam Santoso, S.E., M.M. (Analisis Penelitian dan Pengembangan) 36. Gandi Aria Wijaya SP., M.Si (Penyusun Bahan Penyelenggaraan Litbang)

Pemilik Kinerja	Sasaran	Aktivitas	Nama Tim	Ketua Tim dan Anggota
		Penyusunan RPJPD 2025-2050	Tim Kerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan	<p>Ketua : Sakti Aditya S.H., M.M (Perencana Ahli Muda)</p> <p>Anggota :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor 2. Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan 3. Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah 4. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 5. Inolasari ST, MT (Perencana Ahli Madya) 6. Eko Setyo Utomo S.Sos., M.Si (Perencana Ahli Muda) 7. Ratih Gustiani S.Si. MM (Perencana Ahli Muda) 8. Ati Fatimah S.IP (Perencana Ahli Muda) 9. Herbowo Anggun Putra S.Kom (Pranata Komputer Ahli Muda) 10. Agus Munawar Diansyah S.E. (Perencana Ahli Pertama) 11. Muhammad Syahal Setiawan S.T (Pranata Komputer Ahli Pertama) 12. Zain Fatehatul Mahawani S.T (Analisis Tata Ruang) 13. Andriansyah (Pengadministrasi Umum) 14. Azhar Ginandjar, A.S, S.T., S.Sos., M.M. (Perencana Ahli Madya) 15. Ratu Vivi Silviani, S.T., M.Si. (Perencana Ahli Muda) 16. Febby Lestari, S.P. (Perencana Ahli Muda) 17. Dwi Udayani Retnaningtyas, S.Hut. (Perencana Ahli Muda) 18. Abdul Haris, S.T. (Perencana Ahli Muda) 19. Ridwan Adithiansyah, S.T. (Perencana Ahli Pertama) 20. Muhammad Azzam, A.Md. (Pengelola Geospasial) 21. Fitri Hidayati, S.E. (Perencana Ahli Muda) 22. Bayu Wijoseno, S.Kom. (Perencana Ahli Muda) 23. Dadang Komarudin, S.E., M.M. (Perencana Ahli Muda) 24. Odih Sumirat, S.E., M.M. (Perencana Ahli Muda) 25. Sumaryanto, S.Pd., M.Si. (Perencana Ahli Muda) 26. Uvi Mitra Vienny, S.E. Ak., M.E. (Perencana Ahli Muda) 27. Yeyen Esva Respati, S.E., M.Ec.Dev. (Perencana Ahli Muda) 28. Apoh Ibrahim Saragih, S.E., M.S.E. (Analisis Pembangunan) 29. Rika Noor Ajjah, S.Sos. (Analisis Perencanaan) 30. Drie Sarwiedi S. S.P., M.Si. (Perencana Ahli Madya) 31. Oni Hidayati S.Pi., M.Si (Analisis Kebijakan Ahli Muda) 32. Lusi Nurbaiti Badri S.T. M.Si (Analisis Kebijakan Ahli Muda) 33. Ratu Desy Savitri ST, MT (Perencana Ahli Muda) 34. Erni Solikhati S.E. (Perencana Ahli Muda) 35. Imam Santoso, S.E., M.M. (Analisis Penelitian dan Pengembangan) 36. Gandhi Aria Wijaya SP., M.Si (Penyusun Bahan Penyelenggaraan Litbang)

Pemilik Kinerja	Sasaran	Aktivitas	Nama Tim	Ketua Tim dan Anggota
		Pendampingan Penyusunan Renja Perangkat Daerah 2024	Tim Kerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029	<p>Ketua : Eko Setyo Utomo S.Sos., M.Si (Perencana Ahli Muda)</p> <p>Anggota :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor 2. Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan 3. Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah 4. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 5. Inolasari ST, MT (Perencana Ahli Madya) 6. Sakti Aditya S.H., M.M (Perencana Ahli Muda) 7. Ratih Gustiani S.Si. MM (Perencana Ahli Muda) 8. Ati Fatimah S.IP (Perencana Ahli Muda) 9. Herbowo Anggun Putra S.Kom (Pranata Komputer Ahli Muda) 10. Agus Munawar Diansyah S.E. (Perencana Ahli Pertama) 11. Muhammad Syahal Setiawan S.T (Pranata Komputer Ahli Pertama) 12. Zain Fatehatul Mahawani S.T (Analisis Tata Ruang) 13. Andriansyah (Pengadministrasi Umum) 14. Azhar Ginandjar, A.S, S.T., S.Sos., M.M. (Perencana Ahli Madya) 15. Ratu Vivi Silviani, S.T., M.Si. (Perencana Ahli Muda) 16. Febby Lestari, S.P. (Perencana Ahli Muda) 17. Dwi Udayani Retnaningtyas, S.Hut. (Perencana Ahli Muda) 18. Abdul Haris, S.T. (Perencana Ahli Muda) 19. Ridwan Adithiansyah, S.T. (Perencana Ahli Pertama) 20. Muhammad Azzam, A.Md. (Pengelola Geospasial) 21. Fitri Hidayati, S.E. (Perencana Ahli Muda) 22. Bayu Wijoseno, S.Kom. (Perencana Ahli Muda) 23. Dadang Komarudin, S.E., M.M. (Perencana Ahli Muda) 24. Odih Sumirat, S.E., M.M. (Perencana Ahli Muda) 25. Sumaryanto, S.Pd., M.Si. (Perencana Ahli Muda) 26. Uvi Mitra Vienny, S.E. Ak., M.E. (Perencana Ahli Muda) 27. Yeyen Esva Respati, S.E., M.Ec.Dev. (Perencana Ahli Muda) 28. Apoh Ibrahim Saragih, S.E., M.S.E. (Analisis Pembangunan) 29. Rika Noor Ajjah, S.Sos. (Analisis Perencanaan) 30. Drie Sarwiedi S. S.P., M.Si. (Perencana Ahli Madya) 31. Oni Hidayati S.Pi., M.Si (Analisis Kebijakan Ahli Muda) 32. Lusi Nurbaiti Badri S.T. M.Si (Analisis Kebijakan Ahli Muda) 33. Ratu Desy Savitri ST, MT (Perencana Ahli Muda) 34. Erni Solikhati S.E. (Perencana Ahli Muda) 35. Imam Santoso, S.E., M.M. (Analisis Penelitian dan Pengembangan) 36. Gandhi Aria Wijaya SP., M.Si (Penyusun Bahan Penyelenggaraan Litbang)
		Penyusunan RKPd 2024		

Pemilik Kinerja	Sasaran	Aktivitas	Nama Tim	Ketua Tim dan Anggota
		Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2024	Tim Kerja Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025, Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025, Forum Perangkat Daerah 2025 dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045	<p>Ketua Tim : Ratih Gustiani S.Si. MM</p> <p>Anggota :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor 2. Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Wilayah 3. Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah 4. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 5. Inolasari ST, MT 6. Sakti Aditya S.H., M.M 7. Eko Setyo Utomo S.Sos., M.Si 8. Ati Fatimah S.IP 9. Herbowo Anggun Putra S.Kom 10. Agus Munawar Diansyah S.E. 11. Muhammad Syahal Setiawan S.T 12. Zain Fatehatul Mahawani S.T 13. Andriansyah 14. Azhar Ginandjar, A.S, S.T., S.Sos., M.M. 15. Ratu Vivi Silviani, S.T., M.Si. 16. Febby Lestari, S.P. 17. Dwi Udayani Retnaningtyas, S.Hut. 18. Abdul Haris, S.T. 19. Ridwan Adithiansyah, S.T. 20. Muhammad Azzam, A.Md. 21. Fitri Hidayati, S.E. 22. Bayu Wijoseno, S.Kom. 23. Dadang Komarudin, S.E., M.M. 24. Odih Sumirat, S.E., M.M. 25. Sumaryanto, S.Pd., M.Si. 26. Uvi Mitra Vienny, S.E. Ak., M.E. 27. Yeyen Esva Respati, S.E., M.Ec.Dev. 28. Apoh Ibrahim Saragih, S.E., M.S.E. 29. Rika Noor Ajijah, S.Sos. 30. Drie Sarwiedi S. S.P., M.Si. 31. Oni Hidayati S.Pi., M.Si 32. Lusi Nurbaiti Badri S.T. M.Si 33. Ratu Desy Savitri ST, MT 34. Erni Solikhati S.E. 35. Imam Santoso, S.E., M.M. 36. Gandi Aria Wijaya SP., M.Si
		Pelaksanaan Pameran Pembangunan Kota Bogor		
		Penyelenggaraan Forum Data Kota Bogor		<p>Ketua Tim : Ratih Gustiani S.Si. MM</p> <p>Anggota :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inolasari ST, MT 2. Sakti Aditya S.H., M.M 3. Eko Setyo Utomo S.Sos., M.Si 4. Ati Fatimah S.IP 5. Herbowo Anggun Putra S.Kom 6. Agus Munawar Diansyah S.E. 7. Muhammad Syahal Setiawan S.T 8. Zain Fatehatul Mahawani S.T 9. Andriansyah 10. Drie Sarwiedi S. S.P., M.Si. 11. Ratu Desy Savitri, S.T., M.T. 12. Uvi Mitra Vienny, S.E. Ak., M.E. 13. Fitri Hidayati, S.E. 14. Oni Hidayati, S.Pi., M.Si. 15. Yeyen Esva Respati, S.E., M.Ec.Dev. 16. Febby Lestari, S.P. 17. Sumaryanto, S.Pd., M.Si. 18. Apoh Ibrahim Saragih, S.E., M.S.E. 19. Muhammad Azzam, A.Md.
		Sistem Informasi Data Pembangunan Daerah		

Pemilik Kinerja	Sasaran	Aktivitas	Nama Tim	Ketua Tim dan Anggota
		Penyusunan Laporan Evaluasi RPJP dan RPJMD	Tim Kerja Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dana Transfer Pusat, Dana Transfer Provinsi Jawa Barat)	<p>Ketua Tim : Inolasari ST, MT</p> <p>Anggota :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor 2. Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Wilayah 3. Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah 4. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 5. Sakti Aditya S.H., M.M 6. Eko Setyo Utomo S.Sos., M.Si 7. Ratih Gustiani S.Si. MM 8. Ati Fatimah S.IP 9. Herbowo Anggun Putra S.Kom 10. Agus Munawar Diansyah S.E. 11. Muhammad Syahal Setiawan S.T 12. Zain Fatehatul Mahawani S.T 13. Andriansyah 14. Azhar Ginandjar, A.S, S.T., S.Sos., M.M. 15. Ratu Vivi Silviani, S.T., M.Si. 16. Febby Lestari, S.P. 17. Dwi Udayani Retnaningtyas, S.Hut. 18. Abdul Haris, S.T. 19. Ridwan Adithiansyah, S.T. 20. Muhammad Azzam, A.Md. 21. Fitri Hidayati, S.E. 22. Bayu Wijoseno, S.Kom. 23. Dadang Komarudin, S.E., M.M. 24. Odih Sumirat, S.E., M.M. 25. Sumaryanto, S.Pd., M.Si. 26. Uvi Mitra Vienny, S.E. Ak., M.E. 27. Yeyen Esva Respati, S.E., M.Ec.Dev. 28. Apoh Ibrahim Saragih, S.E., M.S.E. 29. Rika Noor Ajjah, S.Sos. 30. Drie Sarwiedi S. S.P., M.Si. 31. Oni Hidayati S.Pi., M.Si 32. Lusi Nurbaiti Badri S.T. M.Si 33. Ratu Desy Savitri ST, MT 34. Erni Solikhati S.E. 35. Imam Santoso, S.E., M.M. 36. Gandi Aria Wijaya SP., M.Si
		Penyusunan Laporan Evaluasi Capaian RKPD		
		Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Acara Forum TJSLP/CSR Kota Bogor	Tim Kerja Penyelenggaraan Acara Forum TJSLP/CSR Kota Bogor	<p>Ketua Tim : Inolasari ST, MT</p> <p>Anggota :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ati Fatimah S.IP 2. Zain Fatehatul Mahawani S.T 3. Andriansyah
		Pengembangan Website TJSLP		

Pemilik Kinerja	Sasaran	Aktivitas	Nama Tim	Ketua Tim dan Anggota
Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan		Penyusunan Dokumen Feasibility Study Utilitas Terpadu	Tim Kerja Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Feasibility Study Utilitas Terpadu	<p>Ketua : Ratu Vivi Silviani, S.T., M.Si. (Perencana Ahli Muda)</p> <p>Anggota :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor 2. Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan 3. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah 4. Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah 5. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 6. Azhar Ginandjar, A.S, S.T., S.Sos., M.M. (Perencana Ahli Madya) 7. Oni Hidayati, S.Pi., M.Si. (Analisis Kebijakan Ahli Muda) 8. Inolasari, S.T., M.T. (Perencana Ahli Madya) 9. Apoh Ibrahim Saragih, S.E., M.S.E. (Analisis Pembangunan) 10. Febby Lestari, S.P. (Perencana Ahli Muda) 11. Dwi Udayani Retnaningtyas, S.Hut. (Perencana Ahli Muda) 12. Abdul Haris, S.T. (Perencana Ahli Muda) 13. Muhammad Azzam, A.Md. (Pengelola Geospasial)
		Penyusunan Dokumen Rencana Induk Air Limbah	Tim Kerja Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Rencana Induk Air Limbah	<p>Ketua : Ratu Vivi Silviani, S.T., M.Si. (Perencana Ahli Muda)</p> <p>Anggota :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor 2. Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan 3. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah 4. Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah 5. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 6. Azhar Ginandjar, A.S, S.T., S.Sos., M.M. (Perencana Ahli Madya) 7. Febby Lestari, S.P. (Perencana Ahli Muda) 8. Dwi Udayani Retnaningtyas, S.Hut. (Perencana Ahli Muda) 9. Abdul Haris, S.T. (Perencana Ahli Muda) 10. Ridwan Adithiansyah, S.T. (Perencana Ahli Pertama) 11. Muhammad Azzam, A.Md. (Pengelola Geospasial) 12. Fitri Hidayati, S.E. (Perencana Ahli Muda) 13. Drie Sarwiedi S. S.P., M.Si. (Perencana Ahli Madya)
		Penyelenggaraan Pokja/Forum PKP	Tim Kerja Pelaksanaan Laporan Pokja/Forum PKP	<p>Ketua : Abdul Haris, S.T. (Perencana Ahli Muda)</p> <p>Anggota :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ratu Vivi Silviani, S.T., M.Si. (Perencana Ahli Muda) 2. Ridwan Adithiansyah, S.T. (Perencana Ahli Pertama) 3. Muhammad Azzam, A.Md. (Pengelola Geospasial) 4. Odih Sumirat, S.E., M.M. (Perencana Ahli Muda)

Pemilik Kinerja	Sasaran	Aktivitas	Nama Tim	Ketua Tim dan Anggota
		Penyusunan Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca	Tim Kerja Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca	<p>Ketua : Azhar Ginandjar, A.S, S.T., S.Sos., M.M. (Perencana Ahli Madya)</p> <p>Anggota :</p> <p>Fitri Hidayati, S.E. (Perencana Ahli Muda)</p> <p>2. Ridwan Adithiansyah, S.T. (Perencana Ahli Pertama)</p> <p>3. Muhammad Azzam, A.Md. (Pengelola Geospasial)</p> <p>4. Abdul Haris, S.T. (Perencana Ahli Muda)</p> <p>5. Ratu Desy Savitri, S.T., M.T. (Perencana Ahli Muda)</p> <p>6. Febby Lestari, S.P. (Perencana Ahli Muda)</p> <p>7. Ratu Vivi Silviani, S.T., M.Si. (Perencana Ahli Muda)</p> <p>8. Dwi Udayani Retnaningtyas, S.Hut. (Perencana Ahli Muda)</p> <p>9. Abdul Haris, S.T. (Perencana Ahli Muda)</p>
		Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Bogor	Tim Kerja Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Bogor	<p>Ketua : Azhar Ginandjar, A.S, S.T., S.Sos., M.M. (Perencana Ahli Madya)</p> <p>Anggota :</p> <p>1. Ratih Gustiani S.Si., M.M. (Perencana Ahli Muda) Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah</p> <p>2. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah</p> <p>3. Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Wilayah</p> <p>4. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</p> <p>5. Drie Sarwiedi S. S.P., M.Si. (Perencana Ahli Madya)</p> <p>6. Inolasari, S.T., M.T. (Perencana Ahli Madya)</p> <p>7. Ratu Desy Savitri, S.T., M.T. (Perencana Ahli Muda)</p> <p>8. Uvi Mitra Vienny, S.E. Ak., M.E. (Perencana Ahli Muda)</p> <p>9. Fitri Hidayati, S.E. (Perencana Ahli Muda)</p> <p>10. Oni Hidayati, S.Pi., M.Si. (Analisis Kebijakan Ahli Muda)</p> <p>11. Yeyen Esva Respati, S.E., M.Ec.Dev. (Perencana Ahli Muda)</p> <p>12. Febby Lestari, S.P. (Perencana Ahli Muda)</p> <p>13. Apoh Ibrahim Saragih, S.E., M.S.E. (Analisis Pembangunan)</p> <p>14. Muhammad Azzam, A.Md. (Pengelola Geospasial)</p>
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Terlaksananya Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Tim Kerja Pelaksanaan Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	<p>Ketua : Odih Sumirat, S.E, M.M. (Perencana Ahli Muda)</p> <p>Anggota :</p> <p>1. Uvi Mitra Vienny, S.E. Ak, M.E (Perencana Ahli Muda)</p> <p>2. Yeyen Esva Respati, S.E., M.Ec.Dev (Perencana Ahli Muda)</p> <p>3. Dadang Komarudin, S.E., M.M (Perencana Ahli Muda)</p> <p>4. Sumaryanto, S.Pd., M.Si (Perencana Ahli Muda)</p> <p>5. Apoh Ibrahim Saragih, S.E., M.S.E. (Analisis Pembangunan)</p> <p>6. Rika Noor Ajjah, S.Sos (Analisis Perencana)</p>

Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan



Dokumentasi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi



Dokumentasi Forum TJSLP



Dokumentasi Konsultasi Publik RAD Gas Rumah Kaca



Sasaran 3: Meningkatnya tata kelola Bappeda yang efektif, efisien dan akuntabel

Tabel 3.14

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya tata Kelola Bappeda yang efektif, efisien dan akuntabel

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022	Persentase Capaian Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Kenaikan / Penurunan	Target Akhir Renstra	Kota
Meningkatnya tata kelola Bappeda yang efektif, efisien dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi tingkat Perangkat Daerah	81	89,80	110,9	73,17	16,63	82	80,97

Table 18 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya tata Kelola Bappeda yang efektif, efisien dan akuntabel

Sumber: Hasil Evaluasi Implementasi RB Bappeda oleh Tim Penilai

Cara perhitungan:

1. Nilai hasil evaluasi oleh Tim Penilai Reformasi Birokrasi Kota Bogor

Tabel 3.15

Capaian Program yang mendukung Sasaran Meningkatnya Capaian Kinerja, Sinergitas dan Keberlanjutan Perencanaan Pembangunan Daerah

Program	Indikator Program	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian (%)	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian (%)	Target 2024
Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	A	A	100,00	A	A	100,00	A
	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah	3,40	3,89	114,41	3,52	3,58	101,70	3,50

Table 19 Capaian Program yang mendukung Sasaran Meningkatnya Capaian Kinerja, Sinergitas dan Keberlanjutan Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam pelaksanaannya sasaran ini di dukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Pada Tahun 2023 alokasi anggaran yang telah di anggarkan untuk mendukung tercapainya indikator sasaran sebesar Rp. 15.476.957.435, dengan realisasi sebesar Rp. 14.689.166.720 atau sebesar 94,91%.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang dilakukan oleh Tim Penilai Reformasi Birokrasi Daerah Kota Bogor atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Bappeda Kota Bogor tahun 2023, telah di tetapkan nilai indeks reformasi birokrasi sebesar **89,80**, Predikat **“A”** atau **Sangat Baik**, dengan nilai tersebut Bappeda berada pada peringkat pertama dari 36 perangkat daerah, kemudia Dinas Kesehatan pada peringkat ke-2 dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor berada pada peringkat ke-3, untuk rincian evaluasi penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.16**Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Bappeda kota Bogor Tahun 2023**

Indikator Penilaian		Bobot Nilai	Nilai
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	18,00	12,43
2	Capaian IKU Perangkat Daerah	10,00	10,00
3	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	10,00	10,00
4	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	8,00	5,55
5	Tindaklanjut Rekomendasi (TLHP)	8,00	8,00
6	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal PD	8,00	5,79
7	Indeks Kematangan Organisasi	8,00	8,00
8	Indeks Profesionalitas ASN	6,00	5,22
9	Laporan Realisasi APBD Perangkat Daerah	12,00	11,57
10	Nilai Kepatuhan Pencatatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada SPSE	8,00	7,19
11	Penghargaan	4,00	4,00
12	Nilai Rata-rata Penerapan Core Value BerAKHLAK Pegawai pada Perangkat Daerah	4,00	2,05
INDEKS RB PERANGKAT DAERAH		100,00	89,80

Table 20 Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Bappeda kota Bogor Tahun 2023

Berdasarkan rincian penilaian di atas terdapat 3 indikator penilaian yang masih rendah, dari catatan hasil evaluasi, hal tersebut di sebabkan karena :

1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah :

- Anggaran yang ditetapkan belum mengacu sepenuhnya pada kinerja yang ingin dicapai, hal ini dapat dilihat dari rasio anggaran dalam DPA dibandingkan dengan anggaran yang direncanakan dalam Rencana Kerja untuk pencapaian kinerja yang di inginkan hanya sebesar 75%.
- Dalam rencana aksi tidak terlihat adanya analisis dan alternatif solusi bila terdapat deviasi atas capaian kinerja.
- Tidak terlihat adanya penyesuaian aktivitas karena hasil pengukuran kinerja.
- Tidak terlihat adanya penyesuaian anggaran karena hasil pengukuran kinerja.
- Monitoring dan evaluasi rencana aksi per triwulan belum memberikan informasi mengenai factor pendorong, factor penghambat, dan rencana naikan/rekomendasi untuk capaian kinerja yang tidak mencapai target di setiap triwulan.
- Laporan kinerja belum menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahun sebelumnya dan akhir tahun dalam Renstra.

2. Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI :

- Belum melakukan Survey SPKP dan SPAK sesuai denganketentuan dan rutin perbulan.

- Capaian Indikator Kinerja Utama belum mencapai 100 % atau naik dari tahun sebelumnya.
3. Nilai Rata-rata Penerapan Core Value BerAKHLAK Pegawai pada Perangkat Daerah :
- Banyak pegawai bappeda yang tidak mengisi survey Indeks BerAKHLAK pada tahun 2023 karena kendala aplikasinya yang sering error yang menyebabkan nilainya rendah

Indeks Reformasi Birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor di tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 16,63 poin Dimana pada Tahun 2022 Indeks Reformasi Birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor sebesar 73.17. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi ini sudah melebihi dari penyesuaian target yang telah di tetapkan pada tahun 2023 diaman target yang di tetapkan sebesar 82 poin atau 109,52%, sehingga perlu adanya penyesuaian target kembali pada perubahan Rencana Kerja tahun 2024, bila dibandingkan dengan tingkat kota capaiannya lebih tinggi, di angka 110.91%.



Piagam Penghargaan Indeks Reformasi Birokrasi Bapperida Tahun 2023

Upaya – upaya yang telah dilakukan Bappeda selama tahun 2023 untuk mendukung pencapaian kinerja sasaran di jabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Pemilik Kinerja	Sasaran	Aktivitas	Nama Tim	Ketua Tim dan Anggota
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor	Meningkatnya tatakelola Bappeda yang efektif, efisien dan akuntabel			
Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor		Penyusunan ranwal Renstra Bapperida 2025-2029 Penyusunan Renja Bapperida 2024 Penyusunan perubahan Renja Bapperida 2023	Tim Kerja Penyusunan Dokumen Perencanaan	Ketua Tim : Fitri Hidayati, S.E. Anggota : 1. Bayu Wijoseno, S.Kom. 2. Kasubag Umum

Pemilik Kinerja	Sasaran	Aktivitas	Nama Tim	Ketua Tim dan Anggota
		Penyusunan Dokumen Rancangan Awal Renja Bapperida 2025		dan Kepegawaian 3. Azhar Ginandjar, A.S, S.T., S.Sos., M.M. 4. Yanti Heryanti, S.E., M.M. . 5. Uvi Mitra Vienny, S.E. Ak., M.E. 6. Ratu Desy Savitri, S.T., M.T. 7. Erni Solikhati, S.E. 8. Sakti Aditya S.H., M.M
		Penyusunan RKA tahun 2024		
		Penyusunan DPA tahun 2024		
		Penyusunan perubahan RKA tahun 2023		
		Penyusunan perubahan DPA tahun 2023		
		Penyusunan Rencana Aksi Kinerja Bapperida 2023		
		Penyusunan dokumen Rencana PBJ Bapperida TA 2024	Tim Kerja Penyusunan Perencanaan dan Monev PBJ	Ketua Tim : Bayu Wijoseno, S.Kom. Anggota : 1. Fitri Hidayati, S.E. 2. Kasubag Umum dan Kepegawaian 3. Ridwan Adithiansyah, S.T. 4. Yanti Heryanti, S.E., M.M. . 5. Sumaryanto, S.Pd., M.Si. 6. Drie Sarwiedi S. S.P., M.Si. 7. Ratih Gustiani S.Si., M.M.
		Pelaksanaan input RUP Bapperida TA 2023		
		Pelaksanaan pencatatan paket PBJ non EPL Bapperida TA 2023		
		Jumlah monitoring dan evaluasi realisasi bulanan PBJ Bapperida TA 2023		
		Penyusunan Laporan Bulanan Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan lingkup Bapperida Tahun 2024	Tim Kerja Penyusunan Pelaporan Kinerja	Ketua Tim : Bayu Wijoseno, S.Kom. Anggota : 1. Fitri Hidayati, S.E. 2. Kasubag Umum dan Kepegawaian 3. Febby Lestari, S.P. 4. Yanti Heryanti, S.E., M.M. . 5. Dadang Komarudin, S.E., M.M. 6. Oni Hidayati, S.Pi., M.Si. 7. Zain Fatehatul Mahawani S.T
		Penyusunan Laporan Triwulan RKPD 2024 lingkup Bapperida		
		Penyusunan Dokumen LKIP 2023		
		Penyusunan Dokumen LPPD 2023		
		Penyusunan Dokumen LKPJ 2023		
		Penyusunan laporan Capaian Kinerja IKU Renstra Bapperida 2024		
		Penyusunan laporan hasil survey kepuasan layanan Bapperida		
		Penyusunan Dokumen Manajemen Resiko 2025	Tim Kerja SPIP Terintegrasi	Ketua Tim : Fitri Hidayati, S.E. Anggota : 1. Bayu Wijoseno, S.Kom. 2. Kasubag Umum dan Kepegawaian 3. Ratu Vivi Silviani, S.T., M.Si. 4. Yanti Heryanti, S.E., M.M. . 5. Lusi Nurbaiti Badri, S.T., M.Si. 6. Rika Noor Ajjjah, S.Sos. 7. Sakti Aditya S.H., M.M
		Penyusunan Dokumen Fraud Control Plan 2024		
		Penyusunan Dokumen SPIP Terintegrasi		
		Penyusunan Dokumen Pemenuhan MCP KPK		
		Penyusunan Laporan Pembayaran gaji dan Tunjangan	Tim Kerja Penatausahaan Keuangan	Ketua Tim : Yanti Heryanti, S.E., M.M. Anggota : 1. Rini Nuryasari, A.Md. 2. Nani Haryani
		Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan TA 2024		
		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan		
		Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan		
		Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran		
		Penyusunan Laporan Prognosis Keuangan		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tim Kerja Umum dan Kepegawaian	Ketua Tim : Kasubag Umum dan Kepegawaian Anggota : 1. Ujang Yuyus, S.Sos.
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		

Pemilik Kinerja	Sasaran	Aktivitas	Nama Tim	Ketua Tim dan Anggota
		Penyediaan Konsumsi Tamu		
		Penyusunan Laporan layanan pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas dan makan minum rapat		
		Penyusunan pengadaan peralatan dan mesin		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Bapperida		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tim Pengelola Pelayanan Umum Kantor	Ketua Tim : Kasubag Umum dan Kepegawaian Anggota : 1. Ujang Yuyus, S.Sos. 2. Fitri Hidayati, S.E. 3. Rika Noor Ajjiah, S.Sos. 4. Ridwan Adithiansyah, S.T. 5. Nani Haryani 6. Andriansyah 7. Imam Santoso, S.E., M.M.
		Pemeliharaan Kendaraan dinas	Tim Kerja Umum dan Kepegawaian	Ketua Tim : Kasubag Umum dan Kepegawaian Anggota : 1. Ujang Yuyus, S.Sos.
		Pemeliharaan perlengkapan kantor		
		Pemeliharaan gedung		

B. REALISASI ANGGARAN

Kinerja Bappeda Kota Bogor selama Tahun 2023 didukung berbagai program baik yang berdampak langsung maupun yang tidak berdampak langsung. Secara umum, pelaksanaan program untuk mendukung setiap sasaran berjalan dengan baik. Besaran anggaran yang menunjang pencapaian sasaran sebesar Rp. 21.973.582.783,-. Pada akhir tahun 2023, anggaran ini terealisasi sebesar Rp. 21.154.340.135,- atau sebesar 96,27 %, realisasi tersebut masuk kedalam kategori **“Sangat Baik”**.



C. ANALISIS EFISIENSI

Pada Tahun 2023 Bappeda Kota Bogor mengelola anggaran sebesar Rp. 21.973.582.783.- (Dua Satu Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 21.154.340.135.- (Dua Satu Milyar Seratus Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Seratus Tiga Puluh Lima Rupiah) atau sebesar 96.27%, realisasi tersebut masuk kedalam kategori **“Sangat Baik”**. Rincian Anggaran per sasaran pada Bappeda Kota Bogor Tahun 2023 per 31 Desember 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.17
Rincian Anggaran Per Sasaran Tahun 2023

No	Sasaran	Program	Tahun 2023		
			Pagu	Realisasi	Persen Realisasi
1	Meningkatnya Kreativitas, Inovasi, dan peran litbang dalam pengambilan Kebijakan Pembangunan Daerah	Penelitian dan Pengembangan	2.305.387.540	2.225.102.700	96,52
2	Meningkatnya capaian kinerja, sinergitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah	Perencanaan, Pengendalian dan valuasi Pembangunan daerah	2.212.874.300	2.158.435.500	97,54
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.978.363.508	1.840.883.100	93,05
3	Meningkatnya tata kelola Bappeda yang efektif, efisien dan akuntabel	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15.476.957.435	14.929.918.835	96,47
JUMLAH			21.973.582.783	21.154.340.135	96,27

Table 21 Rincian Anggaran Per Sasaran Tahun 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat realisasi anggaran pada setiap sasaran di atas 90% dimana realisasi tersebut termasuk dalam kategori **“Sangat Baik”**. Pada pelaksanaannya terdapat efisiensi anggaran yang rata-rata merupakan hasil efisiensi pada belanja pengadaan barang dan jasa. Sasaran dan program di dukung oleh kegiatan dan sub kegiatan dengan rincian anggaran sebagai berikut:

Tabel 3.18

Anggaran dan Realisasi Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023

No	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	PERENCANAAN	19.668.195.243,00	18.929.237.435,00	96,24
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	177.709.800,00	149.666.700,00	84,22
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	115.308.400,00	106.547.900,00	92,40
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	38.193.600,00	21.649.800,00	56,68
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.207.800,00	21.469.000,00	88,69
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.297.690.954,00	11.955.035.336,00	97,21
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.259.340.754,00	11.916.790.736,00	97,21
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14.914.200,00	14.914.200,00	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	23.436.000,00	23.330.400,00	99,55
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	902.661.381,00	868.388.295,00	96,20
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.959.800,00	12.940.600,00	99,85
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	67.754.200,00	66.486.845,00	98,13
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.528.800,00	17.087.900,00	97,48
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.350.200,00	23.334.615,00	99,93
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000,00	12.330.000,00	82,20
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	766.068.381,00	736.208.335,00	96,10
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	274.425.900,00	267.502.350,00	97,48
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	274.425.900,00	267.502.350,00	97,48
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.165.527.200,00	1.133.566.828,00	97,26
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150.213.520,00	138.306.097,00	92,07
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.015.313.680,00	995.260.731,00	98,02
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	658.942.200,00	555.759.326,00	84,34
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	266.066.400,00	218.104.112,00	81,97
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	96.999.800,00	96.635.400,00	99,62
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	295.876.000,00	241.019.814,00	81,46

No	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
7	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.474.121.500,00	1.448.028.600,00	98,23
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	102.232.000,00	100.105.800,00	97,92
	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah	50.000.000,00	48.938.400,00	97,88
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	555.540.000,00	551.007.400,00	99,18
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	766.349.500,00	747.977.000,00	97,60
8	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	467.492.400,00	442.616.400,00	94,68
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	397.580.000,00	382.740.200,00	96,27
	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	69.912.400,00	59.876.200,00	85,64
	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	271.260.400,00	267.790.500,00	98,72
	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	271.260.400,00	267.790.500,00	98,72
11	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	796.549.200,00	745.756.000,00	93,62
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	378.240.600,00	353.118.200,00	93,36
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	418.308.600,00	392.637.800,00	93,86
12	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1.181.814.308,00	1.095.127.100,00	92,66
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	583.977.400,00	545.526.400,00	93,42
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	532.082.908,00	494.762.500,00	92,99
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	65.754.000,00	54.838.200,00	83,40
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	2.305.387.540,00	2.225.102.700,00	96,52
13	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	847.695.200,00	839.236.160,00	99,00
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek - Aspek Sosial	182.632.125,00	178.176.300,00	97,56

No	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	124.226.700,00	123.367.360,00	99,31
	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	540.836.375,00	537.692.500,00	99,42
14	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1.110.385.140,00	1.072.613.840,00	96,60
	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	100.000.000,00	98.511.550,00	98,51
	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	269.645.011,00	269.561.950,00	99,97
	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	171.758.304,00	151.411.200,00	88,15
	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	473.374.625,00	460.598.540,00	97,30
	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	95.607.200,00	92.530.600,00	96,78
16	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	347.307.200,00	313.252.700,00	90,19
	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	298.648.200,00	295.077.700,00	98,80
	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	48.659.000,00	18.175.000,00	37,35
	JUMLAH	21.973.582.783,00	21.154.340.135,00	96,27

Table 22 Anggaran dan Realisasi Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023

Sumber: Laporan Keuangan Bappeda Tahun 2023

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor dalam kurun waktu Tahun 2023. LKIP menggambarkan Kinerja dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, kinerja program maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

LKIP digunakan sebagai dasar untuk melaporkan capaian kinerja, dan menilai keberhasilan Organisasi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada prinsipnya merupakan alat pertanggungjawaban dari unit organisasi yang lebih rendah kepada unit organisasi yang lebih tinggi yang menonjolkan akuntabilitas manajerialnya. LKIP menjadi alat ukur bagi keberhasilan atau kegagalan PD dalam mencapai sasaran strategis sesuai dengan Renstra PD dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan kinerja.

Laporan Kinerja Bappeda Kota Bogor Tahun 2023 disusun melalui pengukuran data kinerja yang melibatkan seluruh elemen di lingkungan Bappeda Kota Bogor. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja, dengan hasil pengukuran kinerja.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor yang mempunyai kewenangan dalam menentukan arah pembangunan melalui penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sehingga memposisikan laporan akuntabilitas kinerja menjadi bagian integral dalam siklus perencanaan pembangunan karena informasi hasil evaluasi kinerja yang merupakan bagian inti dari laporan akuntabilitas kinerja merupakan critical point yang penting dalam melakukan perbaikan dalam siklus perencanaan pembangunan selanjutnya. Melalui evaluasi, dapat diketahui sebab keberhasilan dan kegagalan kegiatan Bappeda yang selanjutnya akan dipertanggungjawabkan dalam sebuah mekanisme yang ada.

Penentuan variabel sebagai indikator kinerja dan pemilihan parameter yang tepat dalam sebuah pengukuran kinerja, akan didapat pelaksanaan evaluasi kinerja yang akuntabel sehingga memberikan kontribusi positif bagi optimalisasi kinerja Bappeda Kota Bogor di tahun berikutnya.

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik Bappeda Kota Bogor terus menerus mengupayakan perbaikan kinerja. Upaya Perbaikan yang akan dilakukan diantaranya sebagai berikut:

1. Membentuk Tim untuk melaksanakan pendampingan, coaching clinic, asistensi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah mulai dari penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) mulai dari tahapan perumusan permasalahan dan isu strategis, analisis data dan informasi, serta penyelarasan tujuan, sasaran, program yang tertuang dalam dokumen perencanaan tingkat kota (RPJMD/RKPD) dengan dokumen perencanaan perangkat daerah (RENSTRA/RENJA);
2. Membentuk Tim untuk melaksanakan pendampingan, coaching clinic, asistensi perumusan penjenjangan kinerja (cascading kinerja) Perangkat Daerah berdasarkan hasil penyelarasan tujuan, sasaran, program yang tertuang dalam dokumen perencanaan tingkat kota (RPJMD/RKPD) dengan dokumen perencanaan perangkat daerah (RENSTRA/RENJA);
3. Melaksanakan Monitoring dan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan hasil penjenjangan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan perangkat daerah secara berkala;

1) KESIMPULAN

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor memiliki 3 (tiga) sasaran dan 6 (enam) indikator yang ditetapkan yaitu:

SASARAN:

1. Meningkatnya Kreativitas, Inovasi, dan peran Litbang dalam pengambilan Kebijakan Pembangunan Daerah;
2. Meningkatnya Capaian Kinerja, Sinergitas dan Keberlanjutan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Meningkatnya tata kelola Bappeda yang Efektif, Efisien dan Akuntabel.

INDIKATOR:

1. Kategori Inovasi Daerah;
2. Indeks Kualitas Kebijakan;
3. Persentase Rekomendasi Hasil Litbang yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan;
4. Nilai hasil evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota;
5. Persentase Indikator kinerja sasaran pembangunan daerah yang mencapai target;
6. Indeks Reformasi Birokrasi tingkat Perangkat Daerah.

Dari total 6 (enam) indikator sasaran tersebut terdapat 3 (tiga) indikator sasaran yang mencapai target yaitu (1) Kategori Inovasi Daerah (Inovatif); (2) Indeks Kualitas Kebijakan (Baik); dan (3) Indeks Reformasi Birokrasi tingkat Perangkat Daerah (89,8), dan terdapat 2 (dua) indikator sasaran yang

realisasinya tidak mencapai target yaitu (1) Indikator Nilai hasil evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota (24,05); dan (2) Persentase Indikator kinerja sasaran pembangunan daerah yang mencapai target (70,97);.

Total anggaran yang di Kelola Bappeda Kota Bogor pada tahun 2023 sebesar Rp. 21.973.582.783.- (Dua Satu Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 21.154.340.135.- (Dua Satu Milyar Seratus Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Seratus Tiga Puluh Lima Rupiah) atau sebesar 96.27%, dan terdapat efisiensi anggaran dari Indikator Sasaran yang mencapai target sebesar Rp. 819.242.648.- (Delapan Ratus Sembilan Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah).

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Bappeda, dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan Sumber Daya Anggaran dan Sumber Daya Manusia. Setelah itu baru ditetapkan sasaran yang ingin dicapai mengacu pada dokumen RENSTRA/RENJA, yang dituangkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja. Dokumen Perjanjian Kinerja memuat uraian sasaran strategis, program, kegiatan, indikator kinerja dan target kinerja yang ingin dicapai serta anggaran yang disediakan untuk mendukung pencapaian masing-masing target kinerja sasaran.

2) RENCANA TINDAK LANJUT

Demi terwujudnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung ketercapaian Visi dan Misi Kota Bogor, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyempurnaan dokumen perencanaan melalui proses Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2025-2026 dengan memperhatikan rekomendasi LHE SAKIP 2023 yang akan ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah.
2. Melaksanakan penyempurnaan dokumen perencanaan tingkat Perangkat Daerah melalui proses Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2026 dengan memperhatikan rekomendasi LHE SAKIP 2023 yang akan ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah.
3. Melaksanakan penyelarasan dalam penyusunan logical frame work dan penjenjangan kinerja Tingkat Kota dan penjenjangan kinerja tingkat Perangkat Daerah.
4. Melaksanakan pendampingan dan Asistensi serta penyelarasan dokumen RPD 2025-2026 dengan Renstra PD 2025-2026 dengan memperhatikan rekomendasi LHE SAKIP 2023.

5. Pendampingan dan Asistensi serta penyelarasan penjenjangan kinerja tingkat Kota dan Penjenjangan kinerja tingkat perangkat Daerah.
6. Penyelarasan Indikator kinerja dan Target Kinerja Tingkat Kota dan tingkat Perangkat Daerah.
7. Melakukan evaluasi dan penyesuaian target kinerja pada RKPD Perubahan 2023 dan RKPD 2024 serta pada Renja Perangkat Daerah Perubahan 2023 dan Renja Perangkat Daerah 2024, terutama pada target kinerja yang sudah tercapai pada tahun sebelumnya
8. Secara internal melakukan optimalisasi pelaksanaan administrasi, perlu adanya peningkatan kualitas koordinasi antar Bidang sehingga proses perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja serta pelaporan lingkup Bappeda dapat terlaksana dengan optimal.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor kepada publik baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah berperan dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bogor.